

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Pasifik merupakan kawasan strategis yang diperebutkan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Kondisi ini menciptakan suatu tantangan kebijakan luar negeri yang kompleks bagi negara-negara Pasifik. Kontestasi ini secara dominan diartikulasikan melalui persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam memproyeksikan pengaruhnya. Sejak 2013, Tiongkok secara sistematis meningkatkan keterlibatannya di kawasan melalui instrumen kebijakan luar negeri utamanya, Belt and Road Initiative (BRI).¹ Terinspirasi dari Jalur Sutra kuno, BRI adalah proyek infrastruktur global yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping untuk menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui jaringan perdagangan darat dan laut, yang kini cakupannya telah meluas hingga ke Kepulauan Pasifik.²

Bagi *Small Island Developing States* (SIDS), sekelompok negara yang secara resmi diakui PBB karena memiliki kerentanan struktural yang tumpang tindih seperti populasi kecil, keterpencilan geografis, ketergantungan tinggi pada impor pangan strategis, dan ekosistem yang rapuh, BRI menjadi instrumen

¹ Shaleen Khanal and Hongzhou Zhang, "Ten Years of China's Belt and Road Initiative: A Bibliometric Review," *Journal of Chinese Political Science* 29, no. 2 (2024): 361–95, <https://doi.org/10.1007/s11366-023-09873-z>.

² Mykyta Simonov, "The Belt and Road Initiative and Partnership for Global Infrastructure and Investment: Comparison and Current Status," *Asia and the Global Economy* 5, no. 1 (2025): 100106, <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2025.100106>.

pembangunan untuk mengatasi tantangan tersebut.³ Instrumen tersebut merepresentasikan Kepulauan Solomon sebagai studi kasus yang menarik, di mana kombinasi antara ketergantungan pada sektor primer, nilai geostrategis, dan kebutuhan investasi yang mendesak memosisikannya sebagai target penting dalam ekspansi BRI. Hal ini, terlihat pada September 2019 melalui titik balik krusial yakni pengalihan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok. Manuver politik tersebut menjadi katalisator bagi penetrasi pengaruh dan kapital Beijing di bawah kerangka *One-China Policy*.

Manuver diplomatik ini dengan segera memobilisasi kapital Tiongkok melalui institusi seperti EXIM Bank, yang mengimplementasikan kerangka BRI dalam serangkaian proyek strategis.⁴ Contoh konkretnya mencakup pembangunan stadion dan fasilitas penunjang untuk Pacific Games 2023 di Honiara, proyek Koridor Jalan Guadalcanal, kontrak pengembangan kembali Pelabuhan Internasional Honiara, serta investasi untuk memulihkan Tambang Emas Gold Ridge.⁵ Selain infrastruktur fisik, Tiongkok juga memberikan donor ke lembaga pendidikan, seperti beasiswa bagi 29 mahasiswa Solomon Island National University (SINU) pada tahun 2024.⁶

³ Cornelia Guell et al., "Small Island Developing States: Addressing the Intersecting Challenges of Non-Communicable Diseases, Food Insecurity, and Climate Change," *The Lancet Diabetes and Endocrinology* 12, no. 6 (2024): 422–32, [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00100-1](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00100-1).

⁴ Matthew Dornan and Philippa Brant, "Chinese Assistance in the Pacific: Agency, Effectiveness and the Role of Pacific Island Governments," *Asia and the Pacific Policy Studies* 1, no. 2 (2014): 349–63, <https://doi.org/10.1002/app5.35>.

⁵ Lochana Hariharan, "China's BRI and Solomon Islands: Pacific Perspective," *Modern Diplomacy*, 2025, <https://moderndiplomacy.eu/2025/02/05/chinas-bri-and-solomon-islands-pacific-perspective/>.

⁶ Solomon Island National University, "SINU Students Receive PRC Ambassador Scholarship," 2024, <https://www.sinu.edu.sb/SINU-students-rece/>.

Melansir dari data Lowy Institute, Tiongkok berkomitmen untuk menggelontorkan dana sejumlah \$228.097.229 hanya dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.⁷ Alokasi dana tersebut mencakup berbagai proyek strategis nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur stadion untuk Pacific Games, instalasi menara telekomunikasi Huawei senilai lebih dari \$68 juta, hingga penguatan instrumen patronase politik melalui *Rural Sustainable Development Program* (RSDP) serta dukungan anggaran langsung (*budgetary support*) senilai \$20,5 juta pada tahun 2024. Nominal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan total komitmen donor dari Taiwan yang berjumlah \$144.916.434 selama satu dekade (2010–2019).⁸ Mantan Perdana Menteri Danny Phillip menegaskan bahwa pendanaan untuk Pacific Games 2023 merupakan hibah, bukan pinjaman, dengan menyatakan, “*We have made no loans from China since the switch in 2019... We have taken no loans*” [Kami tidak berhutang kepada Tiongkok sejak manuver pada 2019... Kami tidak berhutang].⁹

Namun, di balik narasi pembangunan, keterlibatan Tiongkok ini memicu implikasi geopolitik yang signifikan. Puncaknya adalah penandatanganan pakta keamanan antara kedua negara pada tahun 2022.¹⁰ Kerangka kerja sama ini memberikan wewenang kepada Kepulauan Solomon untuk dapat meminta

⁷ Alexandre Dayant et al., “Lowy Institute Pacific Aid Map: 2024 Key Findings Report,” 2024, [https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/downloads/Lowy Institute Pacific Aid Map - 2024 Key Findings Report.pdf](https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/downloads/Lowy%20Institute%20Pacific%20Aid%20Map%20-%202024%20Key%20Findings%20Report.pdf).

⁸ Indo-Pacific Development Centre, “Pacific Aid Map 2024: Solomon Island,” *Lowy Institute*, 2024, <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/country/solomon-islands/>.

⁹ Alfred Sasako, “Chinese Funding Are Grants Not Loans, Says Philip,” *Solomon Star News*, 2021, <https://www.solomonstarnews.com/chinese-funding-are-grants-not-loans-says-philip/>.

¹⁰ Jon Fraenkel and Graeme Smith, “The Solomons-China 2022 Security Deal: Extraterritoriality and the Perils of Militarisation in the Pacific Islands,” *Australian Journal of International Affairs* 76, no. 5 (September 2022): 473–85, <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2085243>.

kehadiran polisi, polisi bersenjata, dan personel militer dari Tiongkok.¹¹ Kesepakatan ini secara fundamental dipicu oleh tekanan domestik yang dihadapi pemerintah Solomon untuk menangani potensi kerusuhan sipil, seperti yang terjadi di Honiara pada November 2021. Langkah ini, yang oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare dibingkai sebagai penegasan "urusan kedaulatannya", secara langsung mengeskalasi ketegangan geopolitik di Pasifik.

Selain itu, proyek-proyek BRI juga menghadirkan risiko seperti potensi "diplomasi jebakan utang" (*debt-trap diplomacy*), di mana Kepulauan Solomon bisa menghadapi tantangan pembayaran kembali yang dapat mengorbankan kedaulatannya.¹² Ketergantungan ekonomi juga meningkat; mayoritas ekspor kayu dari Kepulauan Solomon kini dibeli oleh Tiongkok, membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi pasar Tiongkok.¹³ Isu lain yang muncul adalah degradasi lingkungan akibat deforestasi dan aktivitas konstruksi skala besar, serta kurangnya transparansi yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal dan media.¹⁴

¹¹ Kate Lyons and Dorothy Wickham, "The Deal That Shocked the World: Inside the China-Solomons Security Pact," *The Guardian*, 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/the-deal-that-shocked-the-world-inside-the-china-solomons-security-pact>.

¹² Annie Young Song and Michael Fabinyi, "China's 21st Century Maritime Silk Road: Challenges and Opportunities to Coastal Livelihoods in ASEAN Countries," *Marine Policy* 136 (2022): 104923, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104923>.

¹³ Madhura Bane, "China's Engagement with the Pacific Islands BT - China and the Indo-Pacific: Maneuvers and Manifestations," ed. Swaran Singh and Reena Marwah (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), 195–215, https://doi.org/10.1007/978-981-19-7521-9_10.

¹⁴ Shipra Shah and Digby Race, "Greening the Blue Pacific: Lessons on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)," *Forest Policy and Economics* 166 (2024): 103263, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103263>.

Sebagai respons terhadap manuver Tiongkok, Amerika Serikat bersama Australia dan Inggris membentuk aliansi pertahanan AUKUS.¹⁵ Washington juga berupaya mengonsolidasikan komitmen negara-negara Pasifik melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Amerika Serikat-Kepulauan Pasifik pada September 2022, yang bertujuan meluncurkan kerangka kerja sama *US-Pacific Partnership*.¹⁶ Namun, sebuah anomali kebijakan muncul ketika Perdana Menteri Manasseh Sogavare secara eksplisit menolak untuk berpartisipasi dalam KTT tersebut.¹⁷ Keputusan ini memperkuat citra Kepulauan Solomon sebagai sebuah kasus studi yang signifikan, karena menempuh jalur yang berbeda dari konsensus regional.

Fenomena ini menghadirkan sebuah urgensi akademis untuk dikaji lebih dalam. Sebagian besar analisis cenderung memotret Kepulauan Solomon hanya sebagai arena pasif dalam kontestasi geopolitik Tiongkok-AS, sebuah pandangan yang terbukti insufisien untuk menjelaskan anomali kebijakan yang ditempuh rezim Sogavare. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memindahkan lokus analisis dari tekanan eksternal ke kalkulasi politik domestik yang sering terabaikan. Dengan membedah bagaimana imperatif keamanan rezim menjadi motor penggerak utama di balik postur kebijakan luar negeri, penelitian ini berupaya mengisi celah konseptual dan empiris yang signifikan, serta memberikan

¹⁵ Manqing Cheng, "AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications," *European Journal of Development Studies* 2, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>.

¹⁶ John Hennessey-Niland, "Maintaining US Credibility in the Pacific Islands," *Journal of Indo-Pacific Affairs*, no. December (2022).

¹⁷ Michael E. Miller, "Solomon Islands Rejects Biden's Pacific Outreach as China Looms Large," *The Washington Post*, 2022, <https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/28/solomon-islands-us-pacific-biden-china/>.

pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara kecil dapat secara aktif menginstrumentalisasi rivalitas kekuatan besar untuk tujuan internalnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kepulauan Solomon mengamankan rezim melalui strategi agensi negara kecil?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: (1) untuk mengetahui bentuk agensi negara kecil yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon untuk mengamankan rezim Manasseh Sogavare dengan bekerja sama dengan Tiongkok, (2) mengungkap paradoks agensi negara kecil, di mana keterbatasan material justru ditransformasikan menjadi keuntungan strategis melalui manuver diplomatik, (3) mengungkap kepentingan lain selain kepentingan nasional berupa keamanan rezim Sogavare yang tengah dilanda protes dari masyarakat sipil.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah akademis studi Hubungan Internasional, khususnya dalam sub-bidang keamanan internasional, studi kawasan Pasifik, dan teori negara kecil. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan teoretis yang menguji dan menyintesis dua kerangka konseptual *Regime Security*

Theory dan *Small States Framework* dalam menganalisis perilaku negara kecil di tengah kompetisi kekuatan besar.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk para pengambil kebijakan, lembaga *think-tank*, dan peneliti yang berfokus pada perilaku negara kecil dalam konstelasi politik internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi literatur untuk memperoleh informasi yang lebih luas guna menghindari *research misconduct* berupa fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme karya ilmiah. Berbeda halnya dengan rumusan masalah yang berfokus pada bentuk utilisasi *Small States Framework* yang dilakukan oleh Kepulauan Solomon dalam dinamika geopolitik Tiongkok-Amerika Serikat, peneliti menggunakan rujukan literatur berupa artikel jurnal. Sumber-sumber informasi yang diperoleh ini dikerucutkan menjadi tiga klaster topik bahasan, antara lain: strategi politik luar negeri Kepulauan Solomon, dinamika kontestasi geopolitik Tiongkok-Amerika Serikat di kawasan Pasifik, dan artikulasi strategi politik rezim Sogavare di Kepulauan Solomon.

1.4.1. Strategi Politik Luar Negeri Kepulauan Solomon

Rujukan pertama, artikel jurnal ilmiah karya **Priagung Arif Budi Wibawa dan kawan-kawan** yang berjudul “**Navigating the Pacific: Solomon Islands Attempt to Gain Influence in the Middle of China–US Rivalry**”, menjelaskan manuver Kepulauan Solomon dalam menerima pakta keamanan Tiongkok dengan

menggunakan *Small States Framework*.¹⁸ Penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan *particular-intrinsic power* (posisi geostrategis) dan *derivative power* (patronase Tiongkok) sebagai respons terhadap dinamika eksternal. Meskipun temuan tersebut menjadi landasan komparatif yang penting, studi itu secara eksplisit tidak memprioritaskan faktor domestik, sehingga menyisakan celah analisis. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan *Regime Security Theory*. Tujuannya adalah untuk memperjelas mekanisme kausal pada level domestik, yaitu bagaimana instrumen-instrumen kekuatan negara kecil tersebut secara spesifik diorkestrasi untuk tujuan konsolidasi rezim Sogavare dalam menghadapi ancaman internal seperti kerusuhan Honiara 2021 dan tekanan oposisi politik.

Rujukan kedua, artikel karya Faqih yang berjudul “**The Normalcy in Solomon Islands–Australia Asymmetric Relations Post-RAMSI**”, berargumen bahwa hubungan bilateral Kepulauan Solomon–Australia tetap berjalan dalam kerangka “kenormalan asimetris” yang negosiatif, sekalipun terdapat divergensi kepentingan terkait pakta keamanan dengan Tiongkok.¹⁹ Temuan ini relevan karena menyediakan konteks eksternal yang menjelaskan bagaimana rezim Sogavare memiliki ruang gerak strategis untuk mendiversifikasi mitra keamanannya tanpa memicu hukuman langsung dari Australia. Namun, fokus Faqih pada level antarnegara menyisakan celah analisis, sebab belum menghubungkan pilihan

¹⁸ Priagung Arif Budi Wibawa et al., “Navigating the Pacific: Solomon Islands Attempt to Gain Influence in the Middle of China-US Rivalry,” *Global South Review* 6, no. 1 (2024): 40, <https://doi.org/10.22146/globalsouth.91034>.

¹⁹ Faqih, “The Normalcy in Solomon Islands–Australia Asymmetric Relations Post-RAMSI,” *Jurnal Politik* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/jp.v9i2.1155>.

aliansi tersebut dengan mekanisme kausal domestik. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membedah bagaimana kebutuhan konsolidasi rezim, seperti pengalaman kerusuhan Honiara 2021 dan pencarian legitimasi koersif, menjadi pendorong utama di balik preferensi keamanan Kepulauan Solomon.

Rujukan ketiga, bab karya **Transform Aqorau** berjudul **“Solomon Islands’ Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China”** dalam buku *The China Alternative*, menyajikan analisis mengenai proses dan faktor pendorong pergeseran pengakuan diplomatik Kepulauan Solomon pada 2019.²⁰ Aqorau mengidentifikasi tiga pendorong utama: dominasi perdagangan Tiongkok, dampak sosial dari migrasi baru Tiongkok yang mengubah lanskap ritel dan patronase, serta praktik *“chequebook diplomacy”* Taiwan yang memengaruhi elite politik. Selain itu, ia merekonstruksi proses pengambilan keputusan internal, mulai dari mandat kebijakan pemerintah hingga keputusan akhir yang diambil tanpa perdebatan parlemen, yang menyoroti adanya resistensi sub-nasional dari Malaita. Penelitian ini menyediakan landasan empiris yang krusial untuk memahami konteks domestik dan kalkulasi elite di balik manuver diplomatik tersebut.

Rujukan keempat, artikel berjudul **“Navigating the waves of change: Framing Pacific Small Island Developing States within a geopolitical and climate context”** karya **Malaika Mikaelsson, Victoria Wibeck, dan Bjorn-Ola Linner**, memberikan analisis krusial mengenai strategi negara kecil Pasifik.²¹

²⁰ Transform Aqorau, “Solomon Islands’ Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China,” in *The China Alternative: Changing Regional Order in the Pacific Islands* (ANU Press, 2021), 319–49.

²¹ Malaika Mikaelsson, Victoria Wibeck, and Björn Ola Linnér, “Navigating the Waves of Change: Framing Pacific Small Island Developing States within a Geopolitical and Climate Context,” *Environmental Development* 56 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101270>.

Karya ini sangat relevan karena mengartikulasikan bagaimana negara-negara SIDS, termasuk Kepulauan Solomon, secara strategis mempolitisasi isu non-tradisional seperti perubahan iklim dan mengadopsi identitas sebagai “*large ocean states*” . Pengadopsian identitas tersebut difungsikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang secara aktif digunakan untuk membangun daya tawar serta legitimasi di forum internasional. Bagi penelitian ini, temuan tersebut memperlihatkan salah satu bentuk strategi yang dapat dioperasionalkan oleh Kepulauan Solomon untuk mengubah kerentanan menjadi pengaruh. Meskipun demikian, celah analisisnya adalah fokusnya yang bersifat lintas-kasus dan konseptual, tanpa menyelidiki bagaimana strategi tersebut dimanfaatkan oleh rezim tertentu untuk tujuan domestik. Oleh karena itu, skripsi ini akan menerapkan lensa tersebut secara spesifik untuk membedah bagaimana rezim Sogavare menggunakan strategi serupa, bukan hanya untuk kepentingan nasional, melainkan secara instrumental untuk tujuan konsolidasi kekuasaan internal.

Rujukan kelima, penelitian **Patrick Köllner** berjudul “**Explaining sender–receiver gaps in signalling: Australia’s ‘Pacific Step-up’ and Solomon Islands’ multi-alignment**”, menerapkan teori *signalling* untuk membongkar adanya *sender–receiver gap* dalam hubungan Australia-Kepulauan Solomon.²² Köllner secara meyakinkan menunjukkan bahwa sinyal kuat dari Australia melalui inisiatif *Pacific Step-up* tidak direspons sesuai harapan karena kalkulasi politik domestik rezim Sogavare, yang pada akhirnya mendorong strategi *multi-alignment*. Temuan ini

²² Patrick Köllner, “Explaining Sender–Receiver Gaps in Signalling: Australia’s ‘Pacific Step-up’ and Solomon Islands’ Multi-Alignment,” *British Journal of Politics and International Relations*, 2024, <https://doi.org/10.1177/13691481241254712>.

secara langsung mendukung fokus penelitian ini pada keamanan rezim, menegaskan bahwa agensi domestik berfungsi sebagai filter utama dalam merespons tekanan eksternal. Kendati demikian, Köllner menyisakan celah analisis karena belum memformalkan mekanisme kausal yang menghubungkan peristiwa domestik kunci, seperti kerusuhan Honiara 2021, dengan keputusan aliansi, serta belum memetakan strategi *multi-alignment* secara eksplisit ke dalam kategori *Small States Framework*.

1.4.2. Kehadiran Belt and Road Initiative di Kepulauan Solomon

Rujukan pertama adalah artikel jurnal ilmiah karya **Marinus Mesak A. Yaung, Yanyan M. Yani, dan Windy Dermawan** berjudul “**Chinese Involvement in Vanuatu and Solomon Island Foreign Policy Against The Papua Issue**”.²³ Penelitian ini berargumen bahwa meningkatnya pengaruh ekonomi Tiongkok melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI) secara langsung berdampak pada perubahan peta geopolitik regional, termasuk memengaruhi kebijakan luar negeri Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Secara spesifik, artikel ini menelaah posisi Tiongkok sebagai salah satu sumber pendanaan yang memungkinkan kedua negara tersebut untuk mengadvokasikan isu Papua di panggung internasional. Meskipun tidak menjadi fokus utama penelitian ini, temuan tersebut relevan karena secara empiris menunjukkan adanya korelasi antara aliran dana Tiongkok dengan artikulasi kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon. Namun, celah analisisnya adalah fokusnya yang terbatas pada isu Papua sebagai variabel dependen.

²³ Marinus Mesak, Yanyan Mochamad Yani, and Windy Dermawan, “Chinese Involvement in Vanuatu and Solomon Island Foreign Policy Against the Papua Issue,” *Sociae Polites* 21, no. 1 (2020): 95–110, <https://doi.org/10.33541/sp.v20i2.1931>.

Rujukan kedua, artikel karya **Joanne Wallis dan kawan-kawan** berjudul **“Ordering the Islands? Pacific Responses to China’s Strategic Narratives”**, menegaskan bahwa negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, bukanlah penerima pasif dari narasi strategis Tiongkok.²⁴ Penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa para pemimpin Pasifik secara aktif menafsirkan dan menginstrumentalisasi narasi Tiongkok, seperti kerja sama Selatan-Selatan dan BRI, untuk melayani kepentingan domestik mereka sendiri, termasuk memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri rezim yang berkuasa. Temuan ini sangat relevan karena secara empiris menguatkan argumen tentang adanya agensi negara kecil. Namun, fokusnya terbatas pada analisis narasi sebagai instrumen geopolitik non-material. Skripsi ini akan memperluas analisis tersebut dengan menelaah bagaimana instrumentalisasi ini tidak hanya terjadi pada level wacana, melainkan juga pada dimensi material seperti patronase ekonomi dan pakta keamanan, yang semuanya diorientasikan untuk tujuan akhir konsolidasi rezim.

Rujukan ketiga, artikel karya **Joanne Wallis dan Czeslaw Tubilewicz** berjudul **“The Pacific Islands and Chinese Power as presence, influence, and interference”**, menawarkan kerangka kerja yang sangat relevan untuk menganalisis dampak Belt and Road Initiative (BRI) di Kepulauan Solomon.²⁵ Alih-alih melihat proyek-proyek BRI hanya sebagai alat Tiongkok untuk membeli pengaruh, penulis menggugat pandangan rasionalis tersebut. Mereka mengajukan

²⁴ Joanne Wallis et al., “Ordering the Islands? Pacific Responses to China’s Strategic Narratives,” *Chinese Journal of International Politics* 16, no. 4 (2023): 457–81, <https://doi.org/10.1093/cjip/poad015>.

²⁵ Joanne Wallis and Czeslaw Tubilewicz, “The Pacific Islands and Chinese Power as Presence, Influence, and Interference,” *European Journal of International Security* 10, no. 2 (2025): 271–92, <https://doi.org/DOI: 10.1017/eis.2024.32>.

taksonomi konstruktivis yang membedakan kekuasaan Tiongkok menjadi tiga dimensi: *presence* (kehadiran fisik proyek BRI), *influence* (sosialisasi nilai), dan *interference* (penggunaan insentif). Kerangka ini memungkinkan penelitian ini untuk membedah bagaimana kehadiran material BRI di Solomon tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi kepatuhan politik. Sebaliknya, skripsi ini dapat menganalisis bagaimana rezim Sogavare secara aktif memediasi dan menginstrumentalisasi setiap dimensi tersebut. Proyek BRI (*presence*) dimanfaatkan sebagai alat patronase politik, narasi kerja sama (*influence*) digunakan untuk legitimasi, dan aliran dana (*interference*) dieksploitasi untuk mempertahankan struktur klientelisme demi tujuan akhir keamanan rezim.

Rujukan keempat, artikel karya Yujie Mei berjudul **“Belt and Road Initiative and Healthy Silk Road: An Alternative Path for Pacific Island Countries to Participate in Global Public Health Governance”**, mengartikulasikan bagaimana Belt and Road Initiative (BRI) berfungsi sebagai platform alternatif bagi negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon, untuk meningkatkan kapasitas tata kelola domestik, khususnya di sektor kesehatan publik.²⁶ Penelitian Mei secara relevan menunjukkan bahwa kehadiran BRI memberikan “kekuatan tawar yang lebih besar” (*greater bargaining power*) bagi negara-negara ini, memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi sumber dukungan dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan tradisional. Temuan ini mendukung analisis dalam skripsi ini mengenai bagaimana Kepulauan Solomon

²⁶ Yujie Mei, “Belt and Road Initiative and Healthy Silk Road : An Alternative Path for Pacific Island Countries to Participate in Global Public Health Governance,” *Global Health Research and Policy*, 2023, <https://doi.org/10.1186/s41256-023-00329-8>.

memanfaatkan *derivative power*. Namun, celah analisisnya adalah fokus Mei yang terbatas pada kesehatan publik sebagai tujuan akhir kerjasama.

Rujukan kelima, artikel karya **Alexandre Dayant** dan **Riley Duke** yang berjudul “**China’s shifting Pacific engagement – loud and brash to “small but beautiful”**”, mengupas pergeseran strategi **BRI** Tiongkok di Pasifik dari yang awalnya berfokus pada proyek infrastruktur berskala besar menuju pendekatan "kecil tapi indah" (*small but beautiful*) yang lebih berhati-hati.²⁷ Pergeseran ini, menurut mereka, didorong oleh kebijakan domestik Tiongkok, risiko reputasi, dan meningkatnya persaingan dari donor lain. Temuan ini sangat relevan karena menempatkan Kepulauan Solomon sebagai sebuah anomali strategis. Di saat pendanaan Tiongkok di kawasan secara umum menurun, dukungannya justru terkonsentrasi di Solomon, yang tecermin pada proyek-proyek simbolis dan bernilai tinggi seperti stadion Pacific Games dan menara telekomunikasi Huawei. Namun, analisis Dayant dan Duke berfokus pada perspektif Tiongkok sebagai donor, sehingga menyisakan celah analisis mengenai bagaimana proyek-proyek terkonsentrasi ini dimanfaatkan secara politis oleh rezim penerima. Oleh karena itu, skripsi ini akan menggunakan temuan mereka sebagai titik berangkat untuk menganalisis bagaimana proyek-proyek BRI yang "mencolok" di Solomon diinstrumentalisasi oleh rezim Sogavare sebagai alat patronase demi tujuan akhir keamanan rezim.

²⁷ Alexandre Dayant and Riley Duke, “China’s Shifting Pacific Engagement – Loud and Brash to ‘Small but Beautiful,’” *Lowy Institute*, 2023, 1–4, <https://www.lowyinstitute.org/publications/china-s-shifting-pacific-engagement-loud-brash-small-beautiful>.

1.4.3 Politik Domestik Kepulauan Solomon

Rujukan pertama, artikel karya **Jon Fraenkel** berjudul **“The Solomons–China 2022 security deal: extraterritoriality and the perils of militarisation in the Pacific Islands”**, secara tajam mengartikulasikan bahwa perjanjian keamanan dengan Tiongkok lebih akurat dibaca sebagai respons langsung terhadap instabilitas domestik, khususnya kerusuhan Honiara 2021.²⁸ Fraenkel berargumen bahwa kesepakatan tersebut bukanlah manuver geopolitik untuk pendirian pangkalan militer, melainkan sebuah instrumen yang dimanfaatkan rezim Sogavare untuk mengamankan kelangsungan kekuasaannya. Secara teoretis, karya ini sangat relevan karena secara eksplisit menghubungkan kerentanan domestik dengan penerimaan kerja sama keamanan eksternal, yang menempatkan keamanan rezim sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri. Bagi penelitian ini, analisis Fraenkel menyediakan landasan empiris yang kuat untuk memahami pakta keamanan sebagai strategi domestik, bukan sekadar respons terhadap dinamika global.

Rujukan kedua, artikel karya **Grant W. Walton** dan **Husnia Hushang** berjudul **“Long live RAMSI? Peace-building, anti-corruption and political will in Solomon Islands”**, mengartikulasikan sebuah konsep kunci yang relevan: kelemahan institusi formal dan defisit kemauan politik mendorong para elite untuk mencari dukungan eksternal.²⁹ Walton dan Hushang menggarisbawahi bahwa ketika tata kelola domestik gagal menopang stabilitas, patronase asing akan dijadikan

²⁸ Fraenkel and Smith, “The Solomons-China 2022 Security Deal: Extraterritoriality and the Perils of Militarisation in the Pacific Islands.”

²⁹ Grant W. Walton and Husnia Hushang, “Long Live RAMSI? Peace-Building, Anti-Corruption and Political Will in Solomon Islands,” *Asia and the Pacific Policy Studies* 9, no. 1 (2022): 39–58, <https://doi.org/10.1002/app5.343>.

sandaran utama untuk melegitimasi rezim. Bagi penelitian ini, argumen tersebut menyediakan pondasi struktural untuk memahami strategi rezim Sogavare. Temuan mereka menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola bukanlah kondisi pasif, melainkan dapat secara aktif diinstrumentalisasi oleh rezim untuk memperkuat posisinya melalui kemitraan dengan aktor eksternal seperti Tiongkok.

Rujukan ketiga, artikel karya **Mathew Doidge** berjudul **“Between tides: examining China discourses in Pacific diplomacy”**, mengkaji penggunaan wacana diplomatik sebagai instrumen kekuasaan dalam momen-momen krusial seperti pergeseran aliansi Solomon pada 2019.³⁰ Doidge secara meyakinkan berargumen bahwa narasi publik tidak hanya merefleksikan kebijakan, melainkan secara aktif digunakan oleh para elite untuk membingkai orientasi politik dan melegitimasi perubahan strategis yang mereka lakukan. Analisis ini sangat relevan karena menyediakan perangkat konseptual untuk membedah strategi politik rezim Sogavare pada level diskursif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menilai bagaimana Sogavare memanfaatkan retorika dan komunikasi publik bukan hanya sebagai pelengkap kebijakan, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mengonsolidasikan legitimasi domestiknya.

Rujukan keempat, artikel berjudul **“Security cooperation in the Pacific Islands: architecture, complex, community, or something else?”** karya **Joanne Wallis dan kawan-kawan**, menganalisis arsitektur keamanan Pasifik sebagai

³⁰ Mathew Doidge and Serena and Kelly, “Between Tides: Examining China Discourses in Pacific Island News Media,” *The Pacific Review* 38, no. 3 (May 2025): 534–63, <https://doi.org/10.1080/09512748.2024.2412010>.

sebuah sistem yang berlapis dan fleksibel.³¹ Kontribusi utama mereka adalah konseptualisasi bahwa arsitektur yang kompleks ini secara strategis memberikan ruang bagi negara-negara kecil untuk memilih mitra keamanan yang paling sesuai dengan kebutuhan domestik mereka. Perspektif ini sangat relevan bagi penelitian ini karena menyediakan landasan struktural untuk memahami bagaimana rezim Sogavare dapat secara instrumental memanfaatkan berbagai mekanisme kerja sama keamanan eksternal, termasuk dengan Tiongkok, untuk tujuan akhir memperkokoh stabilitas politik internal.

Sebagai rujukan terakhir, artikel karya **Terence Wood** berjudul **“The Clientelism Trap in Solomon Islands and Papua New Guinea, and Its Impact on Aid Policy”**, menyediakan pondasi struktural untuk memahami lanskap politik domestik Kepulauan Solomon.³² Wood secara meyakinkan menguraikan konsep *clientelism trap*, sebuah situasi di mana praktik patronase politik untuk mendapatkan dukungan elektoral menjadi penyebab sekaligus akibat dari lemahnya tata kelola negara. Relevansi utamanya bagi penelitian ini adalah penjelasan bagaimana pola politik klientelistik tersebut menciptakan insentif bagi para elite untuk secara aktif mencari patronase eksternal demi mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, analisis Wood memungkinkan skripsi ini untuk menafsirkan pergeseran aliansi dan perjanjian keamanan dengan Tiongkok bukan sebagai

³¹ Joanne Wallis et al., “Security Cooperation in the Pacific Islands: Architecture, Complex, Community, or Something Else?,” *International Relations of the Asia-Pacific* 23, no. 2 (May 1, 2023): 263–96, <https://doi.org/10.1093/irap/lcac005>.

³² Terence Wood, “The Clientelism Trap in Solomon Islands and Papua New Guinea, and Its Impact on Aid Policy,” *Asia & the Pacific Policy Studies* 5, no. 3 (September 1, 2018): 481–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/app5.239>.

kebijakan luar negeri yang abstrak, melainkan sebagai bagian integral dari strategi konsolidasi rezim yang berakar kuat pada dinamika politik domestik.

Berdasarkan tinjauan literatur dari tiga klaster topik, ditemukan adanya benang merah yang menegaskan bahwa negara kecil seperti Kepulauan Solomon secara aktif memanfaatkan agensinya, bukan sekadar menjadi objek pasif dalam dinamika geopolitik. Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bagaimana Kepulauan Solomon memanfaatkan posisi geostrategisnya, mengelola hubungan asimetris, menginstrumentalisasi narasi eksternal, dan menyaring sinyal dari kekuatan besar melalui filter kepentingan domestik. Kendati demikian, celah analisis (*research gap*) yang signifikan tetap ada. Sebagian besar literatur tersebut, meskipun mengakui adanya faktor internal, belum secara sistematis dan terpusat menempatkan keamanan rezim sebagai analisis utama yang menggerakkan manuver-manuver kebijakan luar negeri tersebut. Analisis yang secara eksplisit menghubungkan ancaman domestik yang spesifik seperti kerusuhan Honiara, tekanan oposisi, dan struktur politik klientelistik dengan pilihan aliansi sebagai sebuah strategi keberlangsungan rezim masih belum dieksplorasi secara mendalam. Celah inilah yang menjadi justifikasi dan titik berangkat bagi penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode/Jenis Penelitian	Hasil
1.	<i>Navigating the Pacific: Solomon Islands Attempt to Gain Influence in the Middle of China-US Rivalry</i>	Kualitatif deskriptif / <i>Small States Framework</i>	Menunjukkan Kepulauan Solomon memaksimalkan <i>particular-intrinsic</i> (posisi geostrategis) dan <i>derivative power</i> (patronase Tiongkok) sebagai landasan penerimaan pakta keamanan; mengaitkan konteks

	Oleh: Budi Wibawa dkk (2024)		AUKUS dan Perjanjian Rarotonga; SI menyeimbangkan rivalitas besar untuk menaikkan daya tawar.
2.	<i>The Normalcy in Solomon Islands–Australia Asymmetric Relations Post-RAMSI</i> Oleh: Faqih (2023)	Kualitatif / Teori asimetri Womack	Relasi SI–Australia tetap “normal” dan negosiatif pasca-RAMSI meski ada isu pakta SI–Tiongkok; normalitas dijaga lewat rutinisasi isu, ritual diplomatik, dan retorika kedaulatan; tidak berujung pada punitif/koersif.
3.	<i>Solomon Islands’ Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China</i> Oleh: Transform Aqorau (2021)	Kualitatif deskriptif / Telaah kebijakan berbasis dokumen dan proses	Menjelaskan <i>switch</i> 2019 melalui tiga klaster: ketergantungan dagang/log ke Tiongkok, gelombang migran, dan korupsi/ritel, serta <i>chequebook diplomacy</i> Taiwan (RCDF); memetakan proses task force DCGA, resistensi Malaita, dan kasus sewa Tulagi.
4.	<i>Navigating the Waves of Change: Framing Pacific SIDS within a Geopolitical and Climate Context</i> Oleh: Mikaelsson, Wibeck, dan Linnér (2025)	Systematic literature review / kerangka VDP Triad	Memetakan relasi geopolitik–iklim pada SIDS; menguatkan gagasan “large ocean states” dan diplomasi iklim sebagai instrumen tawar; menyoroti bagaimana kerentanan dipolitisasi jadi leverage eksternal.
5.	<i>Explaining Sender–Receiver Gaps in Signalling: Australia’s ‘Pacific Step-up’ and Solomon Islands’ Multi-alignment</i> Oleh: Styliani Gerani (2025)	Analisis <i>signalling</i> kebijakan luar negeri	Mengidentifikasi relasi <i>sender–receiver gap: costly signals</i> Australia (bantuan, kunjungan, keamanan) tidak otomatis direspons sesuai harapan; agensi domestik Kepulauan Solomon dan memori krisis membuat sinyal eksternal “tumpul,” mendorong <i>multi-alignment</i> .
6.	<i>Chinese Involvement in Vanuatu and</i>	Kualitatif - Deskriptif	Menunjukkan korelasi antara aliran dana Tiongkok (BRI)

	<p><i>Solomon Island Foreign Policy Against The Papua Issue</i></p> <p>Oleh: Marinus Mesak A. Yaung, Yanyan M. Yani, dan Windy Dermawan (2020)</p>		<p>dengan artikulasi kebijakan luar negeri Solomon, khususnya sebagai sumber pendanaan untuk mengadvokasikan isu Papua.</p>
7.	<p><i>Ordering the Islands? Pacific Responses to China's Strategic Narratives</i></p> <p>Oleh: Joanne Wallis, Geyi Xie, William Waqavakatoga, Priestley Habru, dan Maima Koro (2023)</p>	<p>Kualitatif / <i>Strategic narratives</i></p>	<p>Negara-negara Pasifik tidak pasif; mereka menafsirkan dan menginstrumentalisasi narasi Tiongkok (seperti kerja sama Selatan-Selatan dan BRI) untuk memperkuat legitimasi dan kepentingan domestik rezim yang berkuasa.</p>
8.	<p><i>The Pacific Islands and Chinese Power as Presence, Influence, and Interference</i></p> <p>Oleh: Joanne Wallis dan Czeslaw Tubilewicz (2025)</p>	<p>Kualitatif / Konstruktivis dan konsep <i>presence–influence–interference</i></p>	<p>Kehadiran material Tiongkok (termasuk proyek BRI) tidak secara otomatis berarti pengaruh; efektivitasnya dimediasi oleh agensi dan struktur sosial-politik lokal yang kompleks</p>
9.	<p><i>Belt and Road Initiative and Healthy Silk Road: An Alternative Path for Pacific Island Countries to Participate in Global Public Health Governance</i></p> <p>Oleh: Yujie Mei (2023)</p>	<p>Kualitatif / Studi Kebijakan</p>	<p>Mengidentifikasi BRI sebagai platform alternatif yang memberi negara Pasifik "kekuatan tawar lebih besar" untuk diversifikasi sumber dukungan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas tata kelola domestik seperti kesehatan publik.</p>
10.	<p><i>China's shifting Pacific engagement –</i></p>	<p>Kuantitatif / <i>Analisis Data Ekonomi Politik</i></p>	<p>Menyoroti pergeseran strategi BRI Tiongkok ke proyek yang lebih kecil, namun menempatkan</p>

	<i>loud and brash to “small but beautiful”</i> Oleh: Alexandre Dayant dan Riley Duke (2023)		Solomon sebagai anomali strategis yang tetap menerima proyek simbolis bernilai tinggi (stadion, menara Huawei) di saat tren pendanaan regional menurun
11.	<i>The Solomons–China 2022 Security Deal: Extraterritoriality and the Perils of Militarisation in the Pacific Islands</i> Oleh: Jon Fraenkel (2023)	Kualitatif / <i>Regime Security Theory</i>	Perjanjian keamanan Solomon–Tiongkok lebih dimotivasi kebutuhan rezim Sogavare menghadapi instabilitas domestik daripada militerisasi Tiongkok. Fokus pada keamanan rezim.
12.	<i>Long Live RAMSI? Peace-Building, Anti-Corruption and Political Will in Solomon Islands</i> Oleh: Grant W. Walton dan Husnia Hushang (2022)	Kualitatif / Konsep <i>governance dan state-building</i>	Reformasi pasca-RAMSI terhambat lemahnya kemauan politik, sehingga elite menggantungkan legitimasi pada patronase eksternal. Relevan bagi strategi Solomon.
13.	<i>Between Tides: Examining China Discourses in Pacific Diplomacy</i> Oleh: Mathew Doidge (2025)	Kualitatif / Konsep diskursus kuasa	Narasi diplomatik digunakan rezim Sogavare untuk melegitimasi peralihan diplomatik ke Tiongkok dan perjanjian keamanan.
14.	<i>Security Cooperation in the Pacific Islands: Architecture, Complex, Community, or Something Else?</i>	Kualitatif / Konsep <i>security architecture</i>	Arsitektur keamanan Pasifik bersifat berlapis (bilateral–multilateral). Solomon memanfaatkan fleksibilitas ini untuk memperkuat kapasitas rezim.

	Oleh: Joanne Wallis, Henrietta McNeill, James Batley dan Anna Powles (2023)		
15.	<i>The Clientelism Trap in Solomon Islands and Papua New Guinea, and Its Impact on Aid Policy</i> Oleh: Terence Wood (2018)	Kualitatif / Konsep <i>clientelism trap</i>	Politik Solomon dicirikan klientelisme, membuat elite mencari patronase eksternal. Perjanjian Solomon–Tiongkok dapat dibaca sebagai konsolidasi rezim berbasis patronase.

1.5 Kerangka Teoretis

Peneliti menggunakan dua pisau analisis untuk membedah strategi Kepulauan Solomon agar tetap bisa *survive* di tengah-tengah kontestasi geopolitik Tiongkok dan Amerika Serikat: *Regime Security Theory* dan konsep *Small States Framework*. Adapun penjelasan dapat dilihat di bawah ini

1.5.1 *Regime Security Theory*

Kerangka analisis pertama, Teori Keamanan Rezim (*Regime Security Theory*), memindahkan lokus analisis dari negara (*state*) ke rezim sebagai unit fundamental. Mohammed Ayoob dalam bukunya yang berjudul “*The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System*” menegaskan bahwa *regime security* adalah upaya elite penguasa untuk mengamankan kelangsungan hidupnya dari ancaman domestik, seperti kerusuhan

sosial, rivalitas politik, atau gerakan separatis.³³ Konsep ini diperkuat oleh Steven R. David, yang mengartikulasikan kebijakan luar negeri sebagai instrumen survival politik.³⁴ Bagi rezim, aliansi eksternal tidak hanya bertujuan untuk menghadapi ancaman luar, namun juga berfungsi vital untuk memperoleh dukungan, akses terhadap sumber daya koersif, dan legitimasi diplomatik guna menetralkan lawan-lawan internal.

Aplikasi kerangka ini pada kasus Kepulauan Solomon menunjukkan bahwa pergeseran aliansi dari Taiwan ke Tiongkok—yang dipuncaki dengan pakta keamanan pada 2022—tidak dapat dibaca semata-mata sebagai respons terhadap tekanan geopolitik. Sebaliknya, langkah tersebut lebih akurat dipahami sebagai sebuah strategi kalkulatif rezim Sogavare untuk mengonsolidasikan kekuasaan dalam menghadapi ancaman oposisi, potensi mosi tidak percaya, dan pembangkangan sub-nasional dari Provinsi Malaita.

Untuk mempertajam analisis, penting untuk melakukan demarkasi konseptual antara keamanan nasional (*national security*) dan keamanan rezim (*regime security*). Meskipun Ayoob tidak merincinya secara rigid, distingsi ini dapat ditarik dari argumennya serta gagasan David. Perbedaan ini terletak pada tujuh dimensi utama: unit analisis (negara-bangsa vs. elite penguasa), tujuan (kepentingan kolektif vs. kelangsungan kekuasaan), sumber ancaman (eksternal-internal vs. dominan internal), rasionalitas teoretis (realisme klasik vs.

³³ Mohammed Ayoob, *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1995), <https://doi.org/doi:10.1515/9781685853778>.

³⁴ Steven R David, "Explaining Third World Alignment," *World Politics* 43, no. 2 (June 25, 1991): 233–56, <https://doi.org/10.2307/2010472>.

omnibalancing), indikator kebijakan (diplomasi vs. kooptasi dan represi), ukuran keberhasilan (kesejahteraan nasional vs. stabilitas rezim), dan risiko analitik (jargonisme vs. pengorbanan kepentingan publik).

Secara fundamental, negara dan rezim seringkali tumpang tindih namun tidak identik. Ketika penekanan terhadap keamanan rezim mendominasi, kebijakan luar negeri dan postur keamanan negara bergeser dari tujuan kolektif menuju strategi survival elite penguasa. Perbedaan ini krusial agar analisis tidak terjebak dalam retorika "demi negara", padahal sesungguhnya yang diperjuangkan adalah "demi rezim". Ringkasan perbedaan indikator disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbedaan Aspek National dan Regime

Aspek	Negara		Regime	
	Kepentingan	Keamanan	Kepentingan	Keamanan
Unit analisis utama	Bangsa/negara sebagai keseluruhan.	Negara (<i>state</i>) dan nilai inti kolektif	Kelompok elite penguasa/Regime	Regime (elite penguasa atas aparatus koersif)
Fokus Tujuan	Optimalisasi kepentingan kolektif (politik, ekonomi, prestise)	Imunitas dari ancaman (utamanya eksternal) yang mengancam nilai inti seperti kedaulatan dan integritas teritorial	Kelangsungan kekuasaan, distribusi patronase, eliminasi pesaing domestik	Menjaga Regime dari kudeta, pemberontakan, oposisi; meminimalkan ancaman domestik
Sumber ancaman yang dipusatkan	Campuran eksternal-internal, bergantung isu	Konvensional: eksternal; tradisi realist menekankan deterensi dan pertahanan	Terutama internal (oposisi, faksi, pesaing intra-elite)	Terutama internal; dapat meng-"eksternalisasi" ancaman untuk memberi legitimasi tindakan koersif
Rasional teoretis	Ragam aliran; sering menjadi payung normatif-kebijakan	Tradisi Lippmann-Wolfers: keamanan = kemampuan menjaga "core values" melalui pencegahan dan menaklukan ancaman.	Rasionalitas survival aktor berkuasa (politik patronase)	Neoklasik realis + <i>omnibalancing/coup-proofing</i> : ancaman domestik menyaring pilihan keamanan dan aliansi
Indikator kebijakan	Diplomasi, perdagangan, aliansi yang memaksimalkan keuntungan nasional	Postur militer, aliansi, kontrol perbatasan, kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman	Kooptasi elite, pembagian rente, kontrol media/lembaga	Reorganisasi aparat, milisi paralel, represi selektif; akuisisi/dukungan eksternal untuk

				menumpas lawan domestik
Ukur keberhasilan	Pencapaian sasaran kolektif (pertumbuhan, prestise, posisi tawar)	Terjaganya kedaulatan, integritas teritorial, deterensi	Rezim bertahan dan dominan di arena domestik	Rezim aman dari penggulingan; ancaman domestik terkelola/ditumpas
Bias/risiko analitik	Mudah diserap ke jargon kebijakan; batasnya kabur	Over-eksternalisasi ancaman; abai sumber domestik	Berpotensi menubruk kepentingan publik; mendorong otoritarianisme	“State ≠ regime”: dapat mengorbankan kepentingan nasional demi keselamatan Rezim

1.5.2 *Small States Framework*

Berbeda dengan pandangan yang seringkali menganggap negara kecil hanya sebagai objek dalam politik internasional, Kerangka Negara Kecil (*Small States Framework*) menawarkan sudut pandang lain yang menekankan pada peran aktif dan kemampuan mereka untuk bertindak mandiri. Menurut Tom Long, negara kecil bukanlah entitas yang pasif.³⁵ Mereka memiliki tiga sumber kekuatan utama yang dapat dimanfaatkan secara strategis.

Pertama, particular intrinsic power, yaitu kekuatan yang berasal dari keunggulan bawaan negara itu sendiri, seperti lokasi geografisnya yang strategis atau kepemilikan sumber daya alam yang penting. *Kedua, derivative power*, merupakan kekuatan yang didapat dari hubungannya dengan negara besar, misalnya melalui bantuan militer, dukungan ekonomi, atau pengakuan politik yang diberikan. *Ketiga, collective power*, adalah kekuatan yang muncul ketika negara-negara kecil bekerja sama dan menyatukan suara mereka dalam forum-forum multilateral untuk memperbesar pengaruh kolektif mereka.

³⁵ Tom Long, “A Small State’s Guide to Influence in World Politics” (Oxford University Press, May 5, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190926205.001.0001>.

Kerangka ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu menjadi kelemahan mutlak. Dengan strategi diplomasi yang cerdas, negara kecil justru dapat mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah daya tawar yang signifikan di panggung internasional. Penting untuk dipahami bahwa definisi "negara kecil" dalam kerangka ini tidak diukur dari luas wilayah atau jumlah penduduknya semata. Sebuah negara dianggap "kecil" tergantung pada posisinya saat berhadapan dengan negara lain dalam sebuah isu spesifik. Artinya, status "kecil" ini bersifat kontekstual dan dinamis. Faktor-faktor seperti kemampuan membangun jaringan, kelihaian dalam mengangkat isu penting di panggung internasional (*agenda setting*), dan keterbukaan ekonomi menjadi penentu kekuatan yang lebih signifikan daripada ukuran fisik.

Dengan demikian, kerangka ini mengajarkan bahwa "kecil" bukanlah tentang ukuran, melainkan tentang bagaimana sebuah negara secara strategis menggunakan semua potensi yang dimilikinya. Penjelasan ringkas mengenai kriteria ini disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Kriteria Negara Kecil

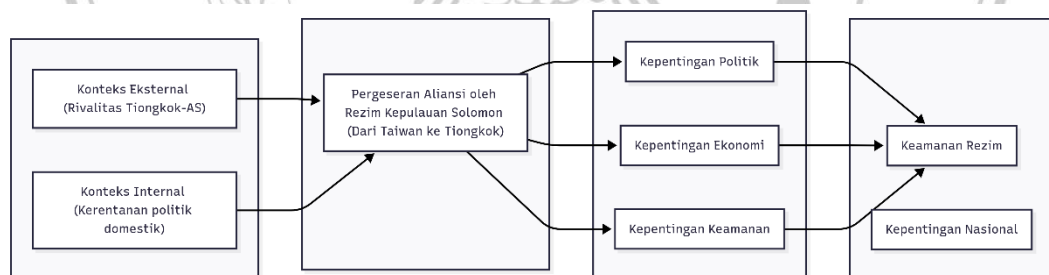
Aspek	Deskripsi
Definisi	Klasifikasi 'negara kecil' dinilai pada isu tertentu terhadap mitra yang lebih kuat, bukan semata ukuran absolut.
Ukuran geografis	Luas wilayah bervariasi; banyak negara kecil berbentuk pulau/ <i>archipelago</i> , namun luas wilayah bukan kriteria utama.
Populasi	$\leq \pm 1,5$ juta jiwa (praktik Bank Dunia/Commonwealth) sebagai indikator praktis; sebagai pembanding klasik, David Vital menyebut ≤ 10 juta (maju) / ≤ 20 juta (berkembang).
Indikator ekonomi	Umumnya ekonomi sangat terbuka dan berjejaring; kapasitas fiskal dan basis SDM cenderung terbatas; ketergantungan pada perdagangan/bantuan/remitansi cenderung tinggi..
Agenda Setting	Kemampuan mengangkat isu agar menjadi perhatian negara besar (<i>saliency</i>). Peluang meningkat jika kohesi preferensi di negara besar rendah dan jarak posisi kebijakan tidak ekstrem.

Kedua kerangka teoretis ini secara sinergis menjelaskan orientasi kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon. *Regime Security Theory* menyediakan lensa untuk memahami motivasi mendasar untuk mempertahankan kekuasaan, sementara *Small States Framework* menguraikan mekanisme strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam praktiknya, rezim Sogavare secara aktif mengonversi aset bawaannya (*particular-intrinsic power*), seperti posisi geografis, menjadi patronase ekonomi melalui proyek infrastruktur Tiongkok. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan hubungan dengan Beijing untuk memperoleh *derivative power*, yakni akses terhadap aparat koersif eksternal melalui pakta keamanan yang dirancang untuk menetralkan ancaman domestik. Strategi ini dilengkapi dengan manuver *collective power* melalui praktik *forum shopping*, di mana rezim secara selektif menghindari forum regional kritis seperti PIF dan merangkul hubungan bilateral sebagai sumber legitimasi alternatif.

Integrasi kedua kerangka ini menunjukkan bahwa pergeseran aliansi Kepulauan Solomon bukanlah sebuah anomali geopolitik, melainkan sebuah strategi survival rezim yang rasional. Rasionalisasi yang mendasarinya bukanlah "kepentingan nasional" yang abstrak, melainkan kalkulasi pragmatis untuk mengamankan stabilitas rezim di tengah persaingan kekuatan besar dan kerentanan politik domestik. Pergeseran diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok, oleh karena itu, harus dipahami bukan sekadar sebagai reorientasi kebijakan, melainkan sebagai

instrumen politik untuk menata ulang tiga pilar kekuasaan: legitimasi, distribusi sumber daya, dan kapasitas koersif.

Dengan demikian, kerangka ini berfungsi sebagai pijakan analitis untuk membedah bagaimana keputusan aliansi menghasilkan luaran kebijakan di ranah politik, ekonomi, dan keamanan. Dukungan eksternal dari Tiongkok ditransformasikan menjadi patronase untuk mengkonsolidasi elite, sementara peningkatan kapasitas aparat keamanan memiliki fungsi ganda: sebagian untuk keamanan nasional, namun sebagian lainnya rawan diinstrumentalisasi untuk meredam oposisi. Analisis terhadap pola distribusi manfaat dan arah penggunaan instrumen keamanan inilah yang akan menjadi pijakan empiris penelitian ini untuk membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon lebih akurat dibaca sebagai strategi keberlangsungan rezim (*regime survivability*) ketimbang pengejawantahan kepentingan nasional. Alur kerja penelitian ini diringkas dalam *flowchart* berikut.



Gambar 1 Flowchart Alur Tesis Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan gaya argumentasi deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna yang dikonstruksi aktor secara alamiah melalui penggalan data beragam, analisis induktif, dan *thick description*.³⁶ Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, bukan untuk menguji hipotesis atau melakukan pengukuran kuantitatif. Fokusnya adalah pada deskripsi dan analisis yang kaya (*thick description*) terhadap strategi, makna, dan dinamika politik luar negeri Kepulauan Solomon di tengah rivalitas kekuatan besar.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana rezim Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengoperasionalkan *Regime Security Theory* dan *Small States Framework* dalam merespons kontestasi geopolitik Tiongkok–Amerika Serikat. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali rasionalitas politik dan wacana di balik setiap tindakan diplomatik, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai kasus tersebut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer

³⁶ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sixth (Los Angeles: SAGE Publications Ltd, 2017).

mencakup dokumen resmi negara, perjanjian internasional, dan pernyataan pejabat yang relevan. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademis, laporan lembaga riset kawasan Pasifik, serta liputan media internasional kredibel yang menyediakan konteks, penjelasan, dan data pendukung. Pemilihan data mengikuti kriteria inklusi berdasarkan relevansi substansial dengan isu keamanan rezim dan strategi negara kecil, kedekatan temporal dengan periode penelitian, kredibilitas penerbit/sumber, serta keterlacakan rujukan dan arsip.

Penelusuran literatur dilakukan melalui kata kunci yang disusun secara *a priori* dan disempurnakan sepanjang riset, antara lain *small states*, *regime security*, *Solomon Islands foreign policy*, *China–US rivalry in the Pacific*, dan *Solomon Islands domestic politics*. Data dihimpun dari laman resmi pemerintah dan organisasi kawasan, repositori perjanjian serta arsip kebijakan, basis data artikel jurnal bereputasi, dan portal media internasional; setiap dokumen dicatat metadatanya (judul, institusi, tanggal, pranala/arsip, tanggal akses) dan diverifikasi silang antarsumber untuk menjaga kredibilitas dan validitas.

1.6.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik nonstatistik. Proses analisis data akan dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan yang diadaptasi dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁷

³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Arizona: SAGE Publications Inc, 2018), <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-data-analysis-4-246128>.

A. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang telah dihimpun dari studi kepustakaan. Data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen resmi akan disaring untuk memilah informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian. Data tersebut kemudian akan diberi kode (*coding*) berdasarkan kategori yang diturunkan dari kerangka teoretis Keamanan Rezim dan Negara Kecil untuk mengorganisir temuan.

B. Penyajian Data

Setelah direduksi, data akan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur. Penyajian ini bertujuan untuk mengorganisir informasi yang kompleks agar pola-pola hubungan antara strategi negara kecil Kepulauan Solomon dan upaya keamanan rezim Manasseh Sogavare dapat terlihat dengan jelas, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan.

C. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan. Proses ini melibatkan pencatatan pola-pola yang muncul, pengembangan penjelasan yang koheren, dan perumusan argumen akhir yang menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana Kepulauan Solomon memanfaatkan kerja sama dengan Tiongkok untuk mengamankan rezimnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjamin kedalaman dan fokus analisis, penelitian ini menetapkan ruang lingkup yang spesifik. Lingkup pembahasan penelitian ini ialah analisis terhadap strategi rezim Perdana Menteri Manasseh Sogavare dalam memanfaatkan *Small States Framework* guna menjamin keamanan rezimnya di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Pasifik. Pembatasan ini mencakup demarkasi waktu dan materi yang jelas untuk memastikan presisi dan konsistensi argumen.

1.7.1. Batasan Waktu

Penelitian ini dibatasi pada periode 2019 hingga 2024. Titik tolak (2019) dipilih karena menandai momen transformatif dalam kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon, yaitu pengalihan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok. Rentang waktu ini kemudian mencakup sekuens peristiwa kunci yang relevan dengan tesis penelitian, antara lain kerusuhan Honiara (2021), penandatanganan pakta keamanan dengan Tiongkok (2022), dan dinamika strategis yang berkelanjutan hingga akhir masa pemerintahan Sogavare. Periode ini dipilih karena merepresentasikan fase paling kritis bagi kelangsungan rezim dan paling relevan untuk menganalisis bagaimana strategi negara kecil dioperasikan.

1.7.2 Batasan Materi

Secara materi, penelitian ini difokuskan pada analisis utilisasi kerangka *Small States Framework*—meliputi *particular-intrinsic*, *derivative*, dan *collective power*—sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang dijelaskan oleh *Regime*

Security Theory. Secara spesifik, analisis akan terpusat pada bagaimana rezim Sogavare: (1) mengonversi aset geostrategis dan sumber daya alam (*particular-intrinsic power*) menjadi daya tawar, (2) mengamankan patronase keamanan dan ekonomi dari Tiongkok (*derivative power*), dan (3) bermanuver di arena multilateral melalui *forum shopping* (*collective power*) untuk menjaga stabilitas politik internal. Dengan demikian, analisis ini secara sadar tidak mencakup seluruh spektrum hubungan luar negeri Kepulauan Solomon, melainkan hanya pada dimensi-dimensi yang relevan dengan kalkulasi keamanan rezim.

1.8 Argumen Pokok

Melalui telaah *Small States Framework* dan *Regime Security Theory*, penulis berargumen bahwa kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon di bawah rezim Manasseh Sogavare digerakkan oleh tuntutan mendesak untuk menjaga keamanan rezim dalam menghadapi serangkaian ancaman domestik yang nyata: instabilitas akibat kerusuhan sipil di Honiara pada 2021, tekanan oposisi politik di parlemen, dan pembangkangan dari pemerintah Provinsi Malaita. Pergeseran aliansi ke Tiongkok merupakan manifestasi agensi strategis sebuah negara kecil yang secara rasional menginstrumentalisasi dinamika geopolitik eksternal untuk tujuan konsolidasi kekuasaan domestik. Strategi fundamental ini diidentifikasi melalui tiga manuver yang saling terkait:

Pertama, instrumentalisasi *derivative power* melalui realiansi strategis. Pergeseran pengakuan diplomatik ke Tiongkok adalah sebuah kalkulasi pragmatis untuk mengakses patronase keamanan. Pakta keamanan yang dihasilkan berfungsi

sebagai polis asuransi eksternal yang memberikan rezim Sogavare kapasitas koersif untuk menetralkan ancaman oposisi dan potensi kerusuhan di masa depan.

Kedua, monetisasi *particular-intrinsic power* untuk patronase politik. Aset geostrategis dan sumber daya alam Kepulauan Solomon dikonversi menjadi keuntungan ekonomi oleh Tiongkok. Proyek-proyek infrastruktur dan bantuan finansial yang mengalir pasca-aliansi baru didistribusikan secara klientelistik untuk memperkuat basis dukungan politik dan melegitimasi kekuasaan rezim, sebuah langkah krusial untuk bertahan dalam sistem politik yang terperangkap klientelisme (*clientelism trap*).

Ketiga, utilisasi selektif *collective power* untuk menjaga otonomi rezim. Melalui praktik *multi-alignment* dan *forum shopping*, rezim secara aktif memanipulasi arena multilateral. Manuver ini bertujuan meminimalkan pengawasan dari forum regional yang kritis sekaligus memaksimalkan legitimasi dari mitra-mitra yang akomodatif, sehingga menjaga ruang gerak kebijakan rezim dari tekanan eksternal.

Secara keseluruhan, ketiga manuver ini membentuk sebuah perilaku anomali strategis. Di tengah ketidakpastian regional, Kepulauan Solomon secara proaktif mengeksploitasi lanskap geopolitik yang berubah bukan untuk memaksimalkan keamanan nasional, melainkan untuk menjamin tujuan yang lebih mendesak dan fundamental: keberlangsungan hidup rezim yang berkuasa.

1.9 Sistematika Kepenulisan

Tabel 1.4 Sistematika Kepenulisan

BAB	ISI
-----	-----

BAB I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.4.1 Strategi Politik Luar Negeri Kepulauan Solomon 1.4.2 Dinamika Kontestasi Geopolitik Tiongkok-Amerika Serikat di Kawasan Pasifik 1.4.3 Artikulasi Strategi Politik Rezim Sogavare di Kepulauan Solomon 1.4.4 Tabel Posisi Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 1.6.3 Metode Analisis Data 1.7 Ruang Lingkup Penelitian 1.7.1 Batasan Waktu 1.7.2 Batasan Materi
--	---

	1.8 Argumen Pokok 1.9 Sistem Penulisan
BAB II Lanskap Sosiopolitik Kepulauan Solomon	2.1 Kepulauan Solomon dalam Arsitektur Regional Pasifik 2.2 Arah Gerak Politik Kepulauan Solomon 2.3 Dinamika Politik Domestik 2.3.1 Kerusuhan Honiara 2021 2.3.2 Oposisi Politik 2.3.3 <i>Clientilism Trap</i> 2.4 Ancaman Ketidakpastian Keamanan Regional
BAB III Agensi Kepulauan Solomon Sebagai Negara Kecil	3.1 Rekonseptualisasi Negara Kecil 3.2 <i>Particular-Intrinsic Power</i> 3.2.1 Geostrategis Sebagai Modal Tawar 3.2.2 Daya Jual Kekayaan Alam 3.3 <i>Derivative Power</i> 3.3.1 “Switch 2019”: Gerbang Pembuka Patronase Tiongkok 3.3.2 Pakta Keamanan Sino-Solomon 3.3.3 Proyek Strategis sebagai Alat Patronase Politik 3.4 <i>Collective Power</i>

	<p>3.4.1 Strategi Politik <i>Multi-Alignment</i> Solomon</p> <p>3.4.2 Taktik <i>Forum Shopping</i></p> <p>3.5 Implikasi Pemanfaatan Kerangka <i>Small States</i> terhadap Keamanan Rezim Kepulauan Solomon</p>
<p>BAB IV</p> <p>Penutup</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

